

ANALISIS POTENSIAL DAN PELUANG PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KERANGKA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU

Afrianto¹

¹Universitas Mega Buana Palopo
Email: afniherni@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out the potential and direction of strategy development as a development area that is encouraged to become a New Autonomous Region in Luwu Regency. This type of research is quantitative with a descriptive approach using LQ analysis, scalogram, Regional Financial Centrality and Capability Index. The results of the Location Quotient (LQ) analysis in the formation of the Central Luwu New Autonomous Region found that the economic sectors classified as base sectors with a value of $LQ > 1$, namely the agriculture, forestry and fisheries sector amounted to 2.39, electricity and gas procurement amounted to 1.23, real estate amounted to 1.54 and health services amounted to 1.25 percent. The results of the scalogram analysis show limited facilities and infrastructure, where from the calculation of the range of scalogram order which is divided into 5 groups, there is only one sub-district that is included in order I, namely, Lamasi District, Order II in Walenrang District, Order III North Walenrang District, Order IV in East Walenrang District, while West Walenrang District occupies Order V. The low degree of decentralization with the pattern of instructive relationships and the very low level of financial independence, caused the local government of Luwu County to be unable to finance the overall development program. This study aims to find out the potential and direction of strategy development as a development area that is encouraged to become a New Autonomous Region in Luwu Regency. This type of research is quantitative with a descriptive approach using LQ analysis, scalogram, Regional Financial Centrality and Capability Index. The results of the Location Quotient (LQ) analysis in the formation of the Central Luwu New Autonomous Region found that the economic sectors classified as base sectors with a value of $LQ > 1$, namely the agriculture, forestry and fisheries sector amounted to 2.39, electricity and gas procurement amounted to 1.23, real estate amounted to 1.54 and health services amounted to 1.25 percent. The results of the scalogram analysis show limited facilities and infrastructure, where from the calculation of the range of scalogram order which is divided into 5 groups, there is only one sub-district that is included in order I, namely, Lamasi District, Order II in Walenrang District, Order III North Walenrang District, Order IV in East Walenrang District, while West Walenrang District occupies Order V. The low degree of decentralization with the pattern of instructive*

Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru

relationships and the very low level of financial independence, caused the local government of Luwu County to be unable to finance the overall development program.

Keywords: Location Quotient; Scalogram; Capability Index; and Regional Financial Centrality

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan arahan pembangunan strategi sebagai sebuah daerah persiapan yang didorong menjadi Daerah Otonomi Baru dari Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis LQ, skalogram, Indeks Sentralitas dan Kemampuan Keuangan Daerah. Hasil analisis Location Quotient (LQ) pada wilayah pembentukan daerah otonomi baru luwu tengah, diketahui bahwa sektor ekonomi yang tergolong sektor basis dengan nilai $LQ > 1$, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2.39, pengadaan listrik dan gas sebesar 1.23, real estate sebesar 1.54 serta jasa kesehatan sebesar 1.25 persen. Hasil analisis skalogram menunjukkan keterbatasan sarana dan prasarana, dimana dari hasil perhitungan range orde skalogram yang terbagi menjadi 5 kelompok, hanya terdapat satu kecamatan yang masuk dalam orde I yaitu, kecamatan lamasi, orde II di kecamatan walenrang, orde III kecamatan walenrang utara, orde IV di kecamatan walenrang timur, sementara kecamatan walenrang barat menempati orde ke V. Derajat desentralisasi yang rendah dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah, menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Luwu tidak mampu membiayai program pembangunan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Location Quotient; Skalogram; Indeks Sentralitas; dan Kemampuan Keuangan Daerah.*

1. LATAR BELAKANG

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah upaya untuk mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah. Bukan hanya dari segi infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga membangun infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi lebih jauh pembangunan ekonominya. Diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing, menunjukkan peranan pemerintah daerah semakin penting. Pemerintahan Daerah yang membenahi hubungan pusat dan daerah memberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri,

Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru

pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Maraknya pemekaran wilayah pasca reformasi, di satu pihak perlu disyukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal. Sesuatu yang dulu diabaikan pada era orde baru. Namun dilain pihak, fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran tersebut sekaligus membawa masalah-masalah baru. “Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal. Perubahan-perubahan tersebut, meski secara de jure telah diatur berdasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak semudah membalikkan tangan. Lepasnya daerah baru dari daerah lama, berarti pula adanya gradasi otoritas, pengurangan anggaran belanja, penurunan penerimaan dan pendapatan, di samping satu hal yang sudah pasti adalah berkurangnya luas wilayah”.*Jurnal Konstitusi*, (Volume 10, Nomor 2, Juni 2013).

Lahirnya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai payung hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, menjadi dasar pembentukan daerah tonomi baru bagi Kabupaten Luwu saat itu, dalam perkembangannya, wilayah ini kemudian terbagi menjadi 4 (empat) daerah administratif yang terdiri dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota masamba berdasarkan Undang -Undang Nomor 13 tahun 1999. Sesudah itu, Kota Palopo sebagai ibu kota Kabupate Luwu saat itu, dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 ditingkatkan statusnya menjadi Kota otonom. Pada waktu itu, Palopo sebagai hasil pemekaran berfungsi ganda disamping sebagai ibu kota induk (Kabupaten luwu) juga sebagai ibu kota otonom.

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan Gross Domestic Product (GDP), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Tetapi kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan dimana pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mempunyai

pertumbuhan (sekitar 7% per tahun), tetapi tingkat kesenjangan pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan kesenjangan pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Joko Waluyo, 2004 dalam Mulyanto Sudarmono).

Menurut Endang sudarsih (2008), kebijakan dan strategi industrialisasi yang diterapkan kedepannya harus memperhatikan sektor pertanian sebagai salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki. Industrialisasi ini justru harus menjadikan keunggulan komparatif di sektor pertanian menjadi keunggulan kompetitif sehingga mempunyai nilai tambah (added value) yang lebih tinggi. Bahkan, sektor pertanian masih merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karena sektor pertanian dan pertambangan merupakan faktor keunggulan komparatif. Seperti pada daerah lain pada umumnya, wacana pembentukan DOB Kabupaten Luwu Tengah adalah upaya percepatan pembangunan yang dilandasi keinginan untuk mensejahterakan rakyat, memperbaiki layanan publik, meningkatkan daya saing daerah dan mempermudah akses publik pada berbagai sektor.

Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah jika dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumber daya alam tinggi lebih tinggi jika dibanding dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Hendra Prasetya (2017).

Keuangan daerah juga merupakan salah satu faktor penting melihat kemampuan Kabupaten induk dalam mendorong Daerah Otonomi Baru. Secara nyata diperlukan merubah pola belanja aparatur dan pembangunan di Kabupaten setempat sehingga dalam jangka pendek akan menciptakan permintaan barang dan jasa yang dapat mendukung terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pola belanja aparatur

juga diarahkan secara langsung dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik secara fisik maupun non fisik. Sehingga dalam jangka panjang keuangan pemerintah sendiri akan meningkatkan optimalisasi pendapatan dan kemandiran fiskal (BAPPENAS bekerja sama dengan UNDP, 2007).

Dalam konteks pendanaan desentralisasi, hal yang sangat krusial untuk dilihat adalah efektivitas dana yang semakin besar bergulir ke daerah yang dibelanjakan oleh daerah dan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dipengaruhi oleh kebijakan belanja masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, dana perimbangan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh karena masing-masing komponen mempunyai tujuan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan daerah. Disadari bahwa instrumen DBH tersebut menimbulkan kesenjangan fiskal antar daerah karena adanya variasi sumber daya antar daerah. Oleh karena itu, instrumen Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Di samping itu, untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan yang relatif rendah, dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pencapaian tujuan dan prioritas nasional serta meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, mendorong pemekaran suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru, harus memperhatikan berbagai aspek pendukung pengembangan daerah terutama aspek sumber daya alam atau sumber ekonomi suatu daerah dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Sebagaimana dalam Undang – Undang Dasar 1945, otonomi daerah sudah sejak semula didambakan oleh bangsa indonesia dan diharapkan akan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Terbitnya Undang – Undang No 22 tahun 1999 merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan semangat penghormatan terhadap keberagaman dan konteks lokal.

Regulasi otonomi daerah yang sejauh ini telah direvisi beberapa kali hingga terbit Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan keputusan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium pemekaran daerah. Kebijakan ini dimaksudkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam dalam mewujudkan hak aspirasi masyarakat.

Menurut Said (2015), salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*). Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.

2.2 Pemeriksaan Daerah dan Parameter Kesisteman

Pada bulan september tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu Undang-Undang No. 23/2014 yang menggantikan Undang - Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama. Meskipun Undang-Undang yang baru ini mengembalikan beberapa kewenangan ke tingkat pusat, Undang - Undang ini memberikan panduan yang lebih jelas terkait distribusi fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian terpenting dalam analisis ekonomi, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama pembangunan

ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada yang tumbuh lambat. Analisis pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah (Sjafrizal, 2018).

2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Bratakusumah (2003), perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

a. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil tidaknya program pembangunan. Pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan akan memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan sebagai ornamen penting dalam proses pembangunan. Aspek lingkungan dibagi menjadi dua bagian, pertama lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam populasi dimana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan, kedua lingkungan eksternal, yakni lingkungan yang berada diluar populasi tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan.

b. Aspek Potensi dan Masalah.

Potensi dan masalah merupakan fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Bahkan hal tersebut dapat menjadi suatu pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan yang dapat menjadi dasar analisis berikutnya.

c. Aspek Ruang dan Waktu.

Sebagai suatu tahapan maka perencanaan pembangunan akan terikat dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu harus menjelaskan suatu kebutuhan dalam timing yang tepat tentang kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa pemberlakuannya serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang (replanning)

d. Aspek Legalisasi Kebijakan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, masalah legalisasi kebijakan memiliki peranan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.

2.5 Keuangan Daerah

Pembentukan daerah otonomi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek pendukung untuk menopang kemandirian suatu daerah, mempertimbangkan berbagai kemampuan, mulai dari kemampuan ekonomi, kondisi sosial-budaya, politik, jumlah penduduk, hingga luas wilayah serta berbagai pertimbangan lainnya. Oleh sebab itu, sejalan dengan adanya perluasan pemberian otonomi daerah, maka diperlukan juga perluasan kewenangan, tanggung jawab kepada sumber-sumber pendanaan dan juga tanggung jawab pengeluaran yang digunakan untuk penyediaan peningkatan pelayanan publik – yang kemudian dikenal sebagai desentralisasi fiskal.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, peran Pemerintah Daerah menjadi penting dan strategis dalam mengupayakan agar daya saing ekonomi menjadi kuat. Pemberian diskresi yang besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan segala urusan yang telah menjadi kewenangannya beserta pendanaannya dari Pemerintah Pusat, hendaknya dapat diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimaksudkan adalah yang bersifat dinamis dan bertanggung jawab (Kemenkeu, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mengkaji potensi, ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan fiskal dalam kerangka pembentukan daerah otonomi baru calon DOB Kabupaten Luwu tengah serta menganalisis strategi pengembangan wilayahnya kedepan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu, dengan data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data – data, mengadakan penelitian kepustakaan yang juga didukung dengan sumber informasi melalui metode wawancara dengan unsur pemerintahan. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif antara lain berupa analisis hierarki pusat pertumbuhan dan pelayanan dengan metode skalogram dan indeks sentralits, metode Location Quotient (LQ) dan derajat otonomi fiskal. Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan sektor basis dan non-basis dapat digunakan metode location quotient (LQ), rumusnya adalah sebagai berikut :

$$LQ_{ij} = X_{ij} / RV_j / X_i / RV$$

dimana

LQ_{ij} = Indeks/koefisien Location Quotient sektor I di kecamatan J

X_{ij} =total produksi sektor i di kecamatan j

X_i = produksi sektor i di Kabupaten (acuan)

RV_j = Total produksi kecamatan j

RV = Total produksi Kabupaten j

Nilai LQ berkisar pada angka satu. LQ lebih besar dari satu artinya terjadi relatif konsentrasi pada wilayah yang sedang dianalisis dibanding wilayah lainnya. Hal ini juga dapat mengindikasikan tentang potensi ekspor ke wilayah lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

4.1.1. Hasil LQ

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda – beda dengan daerah lainnya, dengan potensi dan karakteristik yang berbeda, juga akan mempengaruhi struktur perekonomian daerah. Dengan mengetahui gambaran struktur ekonomi daerah, rumusan kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran dan memberi kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi dan wilayah. Perkembangan ekonomi kabupaten luwu dari waktu ke waktu masih didominasi oleh sektor pertanian, pada data distirbusi peresentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2014 – 2018 menunjukkan bahwa sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan danperikanan menjadi sektor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi di kabupaten luwu. Sektor ini menyumbang lebih dari 50 % tiap tahunnya, bahkan mendekati 54 % pada tahun 2018. Sementara pada sektor yang lainnya tidak terlihat perkembangan yang signifikan, persentase tiap sektor fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor perekonomian dapat diklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis menghasilkan produk berupa barang dan jasa untuk pasar domestik di daerah sendiri dan pasar diluar daerahnya, sedangkan sektor non basis adalah produk berupa barang dan jasa yang hanya melayani pasar pada daerahnya saja, tidak mampu melakukan kegiatan ekspor.

4.1.2. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas

Karakteristik setiap wilayah yang berbeda sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan wilayah. Pembangunan suatu wilayah erat hubungannya dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pengembangan daya saing kabupaten dengan potensi sumber daya yang dimilikinya menjadi urusan pilihan bagi pemerintah daerah. Ketersediaan sarana pelayanan pada calon DOB Luwu Tengah dengan metode skalogram. Metode skalogram adalah salah satu alat analisis untuk dapat mengidentifikasi setiap jenis pelayanan yang ada di masing – masing kecamatan. Beberapa jenis sarana yang dihitung pada analisis ini adalah ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial/ibadah dan fasilitas

**Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka
Pembentukan Daerah Otonomi Baru**

perhubungan. Indikator fasilitas pendidikan diantaranya; SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, dan MA. Untuk layanan kesehatan, indikatornya adalah puskesmas, pusku, polindes, popsyandu, apotik, dokter praktek dan praktek bidan. Sementara itu, indikator layanan ekonomi terdiri dari koperasi, perotokoan, pasar dan BANK. Fasilitas perhubungan diantaranya kantor pos dan terminal bus. Dan untuk pelayanan ibadah dan sosial, indikator yang digunakan adalah masjid, mushollah, gereja, pura, vihara, hotel, wisma dan objek wisata.

Tabel 1. Perhitungan Saklogram

Kecamatan	Jumlah fasilitas					Total
	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	ibadah/ social	Perhubungan	
W. Timur	5	4	2	3	0	14
W. Utara	4	5	3	4	0	16
Walenrang	7	6	4	4	0	21
W. Barat	3	4	0	4	0	11
Lamasi	9	7	4	4	1	25
L. Timur	5	3	3	3	0	14
Belopa	8	7	3	5	0	23
Belopa Utara	7	8	4	5	2	26
Bupon	9	4	4	2	0	19
Bua	6	6	4	4	0	20
Kamanre	6	6	3	4	0	19
Ponrang	8	6	4	3	1	21
ponrang selatan	9	6	3	3	0	21
Suli	8	6	4	5	0	23
Suli barat	8	4	3	3	0	18
Larompong	8	7	3	6	0	24
Larompong Selatan	7	7	3	5	0	22
Bajo	9	6	4	4	2	25
Bajo Barat	7	5	0	3	0	15
Bastem	3	4	1	2	0	10
Bastem Utara	4	4	2	2	0	12
Lantimojong	6	4	2	4	0	14

Dari hasil perhitungan skalogram ditemukan jumlah error yang didapati dari 22 kecamatan (N) dan 16 fasilitas (k) di kabupaten luwu. Dengan demikian, untuk menghitung COR adalah sebagai berikut.

$$\text{COR} = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

$$\text{COR} = 1 - \frac{16}{22 \times 16}$$

$$\text{COR} = 1 - 0,0625$$

$$\text{COR} = 0,94$$

Berdasarkan ketentuan dari nilai COR yang layak untuk dianalisis adalah bernilai $\geq 0,9$. Dari hasil perhitunngan tersebut yang nilai COR nya adalah 0,94 menunjukkan data tersebut layak dilanjutkan untuk dianalisis. Hasil perhitungan secara keseluruhan jenis sarana dan prasarana pembangunan di kabupaten luwu, terdapat jumlah jenis unit yang tertinggi adalah 25 dan jenis unit yang terendah adalah 10. Sebelum menentukan orde dari 22 kecamatan di kabupaten luwu, maka terlebih dahulu adalah menentukan jumlah ordenya. Berikut perhitungan jumlah orde

$$\text{Jumlah orde} = 1 + 3,3 \log n \text{ (jumlah kecamatan)}$$

$$\text{Jumlah orde} = 1 + 3,3 \times 1,34$$

$$\text{Jumlah orde} = 1 + 4,422$$

$$\text{Jumlah orde} = 5$$

Berati jumlah orde yang ada di kabupaten luwu adalah 5, selang interval untuk menentukan orde tiap kecamatan adalah;

$$\text{Range} = (\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}) / \text{Jumlah Orde}$$

$$\text{Range} = (26 - 10) / 5$$

$$\text{Range} = 3.2$$

4.1.3. Kapasitaas Fiskal Kabupaten Luwu

Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah di kabupaten luwu, beberapa analisis rasio keuangan yang dipakai untuk melihat efektifitas kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menghitung derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah selama periode anggaran tahun 2016 – 2018.

Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru

a. Derajat desentralisasi

Berdasarkan hasil perhitungan pada data Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Luwu di tahun 2016-2018, ratio derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten luwu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Derajat Disentralisasi

Tahun	PAD	Total pendapatan daerah	Ratio derajat desentralisasi	Kriteria
2016	99.599.020.129	1.407.134.199.113	7.08 %	Sangat kurang
2017	106.797.938.000	1.283.399.539.380	8.32 %	Sangat kurang
2018	109.956.013.141	1.340.510.284.241	8.20 %	Sangat kurang
Rata –rata			7.87 %	Sangat kurang

Sumber: APBD Kabupaten Luwu Tahun 2016-2018

Data 3 tahun yang dijabarkan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah kabupaten luwu tergolong sangat kurang. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten luwu belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri.

b. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan asli daerah terhadap dana transfer pusat, provinsi dan pinjaman di kabupaten luwu, Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten luwu tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Transfer pusat, provinsi + pinjaman	Ratio kemandirian daerah	Kriteria
2016	99.599.020.129	1.307.534.270.004	8 %	Instruktif
2017	106.797.938.000	1.176.601.601.380	9 %	Instruktif
2018	109.956.013.141	1.230.554.271.100	9 %	Instruktif
Rata –rata			9 %	Instruktif

Sumber: APBD Kabupaten Luwu Tahun 2016-2018

4.2. PEMBAHASAN

Potensi Ekonomi Dari Hasil Perhitungan LQ

Kerangka pembentukan daerah otonomi baru adalah upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan

serta peningkatan daya saing daerah dengan melihat kesitimewaan dan kekhususan serta potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

Kabupaten Luwu sebagai wilayah yang memiliki sektor unggulan, khususnya pada sektor pertanian perlu mendorong berbagai langkah strategis pembangunan dalam mengoptimalkan potensi sektor sehingga menciptakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan perhitungan LQ pada 17 sektor yang ada di Kabupaten Luwu dengan merujuk pada data BPS Kabupaten Luwu dalam angka tahun 2019, Sektor pertanian, real estate dan jasa kesehatan yang memiliki nilai $LQ \geq 1$. Sektor pertanian yang memiliki nilai LQ terbesar dengan nilai 2.39, artinya bahwa hasil produksi dari sektor ini sudah melebihi kebutuhan pasar domestiknya sehingga bisa melakukan ekspor dua kali besaran dari nilai produksinya. Hal ini tergambar dari kondisi geografis wilayah Kabupaten Luwu dalam hal luas lahan untuk pengelolaan lahan pertanian dengan luas sekitar 89 % dari total luas lahan yang ada di Luwu. Selain itu, dari sektor tenaga kerja, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan adalah tenaga kerja pada sektor pertanian dengan jumlah 86.807 dari jumlah angkatan kerja sebanyak 150.725 atau sekitar 58 %.

Pengembangan wilayah harus sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada wilayah –masing – masing. Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada calon DOB Luwu Tengah, semua sektor memiliki potensi unggulan. Bahkan, pada tiap kecamatan memiliki komoditi unggulan yang dapat mengekspor ke wilayah lain. Sementara itu pada sektor peternakan, 6 kecamatan ini juga memproduksi sapi, kerbau, kambing, itik dan ayam. Terdapat 4 hewan ternak yang LQ nya melebihi 1 yaitu sapi, kerbau, itik dan babi. Dari 4 hewan ternak tersebut, produksinya di atas 40 % dari total produksi di Kabupaten Luwu, sapi memproduksi 50 %, babi 51 %, kerbau 42 % dan itik 41 %. Potensi Besar yang dimiliki wilayah ini akan lebih menunjang kemajuan pembangunan daerah ini jika dikembangkan sebagai spot hilirisasi industri pertanian dengan bentuk agroindustry.

Ketersediaan, Fungsi Dan Penyebaran Pusat Pelayanan Calon DOB Luwu Tengah

Kecamatan Walenrang Barat dilihat secara rinci dari keberadaannya fasilitasnya, pada

fasilitas ekonomi tidak terdapat pertokoan, pasar dan bank. Wilayah ini tertinggal dari ketersediaan infrasktruktur seperti daerah pegunungan lainnya di kabupaten luwu yaitu bastem, bastem utara, dan suli barat. Beberapa fasilitas yang tidak terdapat pada semua kecamatan di wilayah Calon DOB Luwu tengah yaitu fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi, fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, fasilitas perhubungan belum terdapat terminal bus, fasilitas sosial yaitu wisma, hotel, pura dan vihara. Terkait soal rumah ibadah (pura dan vihara), dari rilis BPS kabupaten luwu dalam angka tahun 2019, jumlah penduduk yang beragama hindu sebanyak 4152 dan terdapat 2.606 jiwa yang berada di wilayah calon DOB luwu tengah, sehingga hal ini juga perlu menjadi prioritas pemerintah kabupaten luwu. Selain itu, yang paling sulit dirasakan masyarakat adalah tidak adanya rumah sakit pada wilayah ini, masyarakatnya lebih banyak berobat ke rumah sakit terdekat di kota palopo karena faktor jauhnya jarak ke ibu kota kabupaten. Hal ini bisa dilihat dari data skalogram ketersediaan fasilitas kesehatan (rumah sakit) hanya ada di kecamatan belopa dan belopa utara.

Pengelompokkan derajat penyebaran unit ditentukan dengan membagi 22 kecamatan menjadi tiga rentang yang sama. Penyebaran fasilitas tertinggi diklasifikasi dari keberadaan unit dari total kecamatan yang memiliki nilai $\geq 70\%$. Penyebaran fasilitas sedang diklasifikasi dari jumlah unit dengan nilai $35\% - 70\%$, serta jumlah unit yang tersebar di kecamatan dengan nilai $\leq 34\%$ dikategorikan rendah.

Optimalisasi Sektor Dengan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Terpadu

Dengan keberadaan komoditi unggulan pada masing – masing kecamatan, pembangunan ekonomi wilayah harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal dalam merumuskan pembentukan wilayah DOB kabupaten luwu tengah (RTRW). Hal ini juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan sinergitas pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah calon DOB luwu tengah. Dari hasil pemetaan potensi dan keberadaan saran dan prasarana, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi sektor untuk menciptakan sumber – sumber pendapatan baru dan ruang–ruang usaha bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan PERDA no 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana struktur ruang wilayah kabupaten luwu dibagi menjadi Pusat kegiatan lokal

(PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Pelayanan Kawasan. Pada wilayah calon DOB luwu tengah, kecamatan walenrang menjadi simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat. Kecamatan walenrang barat dan walenrang timur di rencanakan menjadi pusat pelayanan lingkungan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa. Kecamatan lamasi, lamasi timur dan dan walenrang timur berfungsi melayani skala kecamatan atau beberapa desa.

Dilihat dari potensi dan keadaan kecamatan saat ini, kebijakan perencanaan ruang belum optimal terlaksana. Dari hasil analisis skalogram, indeks sentralitas. Kecamatan lamasi dengan jumlah penduduk terbanyak, keberadaan fasilitas dan fungsi fasilitas lebih di atas dibandingkan dengan kecamatan walenrang. Sementara itu, kecamatan walenrang utara yang memiliki wilayah yang jauh lebih luas dari kecamatan lainnya hanya dipersiapkan sebagai wilayah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan desa. Padahal wilayah ini memiliki banyak sektor – sektor unggulan yang menopang kegiatan usaha pertanian pada wilayah calon DOB Luwu tengah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten luwu perlu menempuh strategi berikut:

- a. Optimalisasi potensi sumber daya di wilayah calon DOB luwu tengah pada setiap sektor dengan mendorong kerjasama multistakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) sehingga memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah
- b. Pemerintah mendorong Pengembangan industry yang menunjang aspek pertanian (agroindustri), khususnya padi sawah pada calon DOB luwu tengah yang memproduksi 48 % dari total produksi padi sawah di wilayah kabupaten luwu.
- c. Membuka sarana dan prasarana ekonomi di wilayah Calon DOB luwu tengah untuk mempermudah akses investasi ke wilayah calon DOB Luwu tengah, khususnya dalam sektor perindustrian dan perdagangan. Penyusunan kebijakan investasi perlu dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor – sektor lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dari analisis potensi ekonomi, ketersediaan sarana dan

prasarana serta kemampuan keuangan daerah dalam kerangka pembentukan daerah otonomi baru luwu tengah yaitu secara umum, wilayah calon DOB Luwu tengah memiliki potensi sumber daya yang kaya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Produksi pada beberapa jenis komoditi di enam kecamatan telah mampu memenuhi kebutuhan pasar di wilayahnya dan mampu melakukan ekspor dalam jumlah yang cukup besar. Potensi tersebut diantaranya adalah padi sawah yang secara keseluruhan total produksi dari wilayah ini sebanyak 48 % dari total produksi yang ada di kabupaten luwu. Produksi di sektor perkebunan jenis komoditi kelapa dalam, kopi, sagu dan aren juga menjadi potensi unggulan di wilayah ini. Bahkan, komoditi sagu dan aren memiliki nilai $LQ > 4$. Pada sektor peternakan, potensi unggulan dari perhitungan LQ adalah sapi potong, kerbau, babi dan itik. Dan sektor perikanan, wilayah ini memproduksi perikanan budidaya dalam jumlah yang cukup besar. Sektor – sektor ini memiliki keunggulan nilai kontribusi dalam perbandingan antar wilayah kabupaten luwu sehingga sangat layak untuk dikembangkan dan menjadi potensi unggulan dalam meningkatkan perekonomian wilayah pada calon DOB Luwu tengah secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan potensi besar ini, calon DOB luwu tengah berpeluang mengembangkan wilayahnya sebagai daerah yang sejahtera.

Keterbatasan sarana dan prasarana pada wilayah calon DOB luwu tengah menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah ini mengakses berbagai pelayanan pemerintah. Pembangunan yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi. Fungsi wilayah atau pusat pertumbuhan masih terfokus pada satu kecamatan, yaitu kecamatan lamasi yang berada pada kategori sedang. Sementara kecamatan yang lain berada pada fungsi wilayah yang rendah dan sangat rendah. Derajat desentralisasi yang rendah dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah, menyebabkan pemerintah daerah kabupaten luwu tidak mampu membiayai program pengembangan daerah secara menyeluruh, khususnya pemerataan pembangunan. Hal ini juga berimplikasi pada upaya mendorong pembentukan daerah otonomi baru karena akan menyebabkan penerimaan PAD pada kabupaten induk berkurang.

Strategi pengembangan wilayah dalam kerangka pembentukan daerah otonomi

baru luwu tengah adalah dengan mendorong prioritas pembangunan berikut ini:

- a. Pengembangan sektor pertanian pada wilayah DOB Luwu tengah dengan bentuk agroindustri, suatu sistem terintegrasi yang melibatkan sumberdaya hasil pertanian, manusia, ilmu dan teknologi, modal (uang) dan informasi.
- b. Menemukan dan mempromosikan citra komoditi pada wilayah ini sebagai produk unggulan sehingga memberi nilai tambah bagi PAD dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Pembukaan akses dan peningkatan sarana dan prasarana di setiap wilayah yang ada pada calon DOB luwu tengah akan membuka peluang bagi investor dalam mendorong pengembangan usaha berbasis potensi wilayah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima, STIM YKPN. Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln, 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua*. BPFE. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu*
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Luwu*
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010-2018*
- BAPPENAS bekerja sama dengan UNDP. 2007. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*. BRIDGE. Jakarta
- BAPPENAS. 2015. *Modul Penghitungan Indeks Pembangunan Desa*. Jakarta
- Bratakusumah, Riyadi D.S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Jaya. Jakarta.
- Daryanto dan Hafizrianda. 2012. *Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan pembangunan Ekonomi Daerah Edisi ke dua*, Penerbit PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Fadhillah, Harnawansyah. 2011. *Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Menunjang Penguatan Ekonomi Daerah*. M. Purwanto. *Statistika Untuk Penelitian*. PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Firmansyah, L.Ali. 2014. *Strategi Pembangunan Ekonomi di Cianjur Selatan Sebagai Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cianjur Selatan*. Tesis. IPB. Bogor.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta

**Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka
Pembentukan Daerah Otonomi Baru**

- Ilyas, M. 2001. Analisis Kesiapan Potensi Ekonomi Wilayah di Sulawesi Tenggara terhadap kemandirian pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah. Tesis. IPB. Bogor.
- Kaho, Josep Riwu. 2006. Prospek Otonomi di Negara Indonesia, Rajawali Grafindo. Jakarta.
- Mahkamah konstitusi Republik Indonesia. 2013. Jurnal Konstitusi Volume 10, No 2. Redaksi Jurnal Konstitusi. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Jhingan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyanto Sudarmono. 2006. Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Jateng". Fakultas Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nurhasanah, Aan dkk. 2018. Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur. TATA LOKA Volume 20 Nomor 3. 282-294 Tarigan, 2012
- Perda kabupaten Luwu No 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten luwu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Rangkuti, Freddy. 2013. Analisis SWOT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Saragih, J.P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2007. Analisis pemekaran wilayah dan bebannya pada APBN. Tim analisis APBN. Jakarta
- Sri Utari, Endang. 2014. Analisis Sistem Pusat Pelayanan dan Permukiman di Kota Yogyakarta. Jurnal of Economics and Policy, Published: Maret 2015. Universitas Negeri Semarang.
- Sjafrizal. 2018. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, Cetakan Tiga. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sjafrizal. 2018. Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia, cetakan pertama. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarsih, Endang. 2008. Kajian Konsep Sustainable Farming dalam Pembangunan Sektor Pertanian. Jurnal Sosial Humaniora. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya
- Syarif Hidayat. 2000. Refleksi Realita Otonomi Daerah dan tantangan kedepan, Pustaka Quantum. Jakarta.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2003. Economic Development. Eight Edition. Pearson Education Limited. England
- Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka
Pembentukan Daerah Otonomi Baru**

Undang – Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.